

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. (n.d.). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil Jakarta, C. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (n.d.). *Prodjohamidjojo, Martiman. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raharjo, S. (n.d.). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2011). *Factor – Factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1980). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.
- Widnyana, I. M. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kuhap.

Undang – undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peratuarn Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 02001/SK/BPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

C. KAMUS

Pusat Bahasa Dept.Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2001.

J.C.T Simorangkir.2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

D. WEBSITE

<https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->. Diakses hari selasa, tanggl 15 mei 2018 jam 19.20.

Wahyu Sikumbang," *Gudang Kosmetik Ilegal di Bukittinggi Digrebek Aparat* ".
<https://daerah.sindonews.com/read/1012865/174/gudang-kosmetik-ilegal-di-bukittinggi-digrebek-aparat,2015>. diakses pada tanggal 10 oktober 2017, pukul 21.44